PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi Hari: Rabu Tanggal: 11 Februari 2015 Halaman: 4

JIKA TAK SESUAI BAKAL DIGANTI

Dinsosnakertrans Verifikasi Penerima Bantuan JKN

YOGYA (MERAPI) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta akan memverifikasi data Penerima Bantuan Iur (PBI) untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jika ditemukan data PBI tidak memenuhi verifikasi akan diusulkan penerima pengganti ke pemerintah pusat.

"Akan kami verifikasi data penerima PBI. Data dari pusat itu didasarkan data lama, sehingga tentu akan mengalami perubahan," kata Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar, Selasa (10/2).

Verifikasi tersebut untuk memastikan penerima PBI masih ada. Dimungkinkan penerima PBI sudah pindah tempat tinggal maupun meninggal. Dia mengemukakan, jika data penerima PBI sudah meninggal atau pindah tempat di luar Yogyakarta pihaknya akan mengusulkan penggantian. "Bisa nanti diusulkan pengganti penerima PBI yang meninggal. Bisa diusulkan untuk dialihkan ke pemegang KMS tapi tidak menerima PBI," ucapnya.

Verifikasi penerima PBI itu akan dilakukan tahun ini sampai masa transisi JKN BPJS di tahun 2016. Dia juga menyebut verifikasi PBI juga dapat dilakukan bersamaan dengan pendataan pengusulan penerima Kartu Menuju Sejahtera (KMS) tahun 2016.

Warga miskin yang menerima PBI biaya iur premi ke BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah. Kota Yogyakarta mendapatkan kuota PBI dari pemerintah pusat untuk program JKN BPJS sebanyak 105.632 jiwa. Data tersebut berdasarkan data warga miskin survei BPS di tahun 2011. Di Kota Yogyakata sendiri warga miskin dan rentan miskin pemegang KMS ada 8.881 Kepala Keluarga (KK) atau 60.230 jiwa.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (PJKD) Kota Yogyakarta Umi Nur Chariyati mengatakan ada perbedaan parameter data warga miskin dari BPS di 2011 untuk data PBI dengan KMS. Pada BPS pendataan warga miskin didasarkan pada domisili warga miskin, sedangkan KMS pada KTP warga miskin. "Kami harap PBI itu juga bisa sinkron dengan warga miskin pemegang KMS," ujarnya.

Selama masa transisi ke BPJS Kesehatan warga Kota Yogyakarta tetap akan dilayani Jamkesda sampai tahun 2016. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Yogyakarta No 405/09/SE/2015 tentang Jamkesda Kota Yogyakarta

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta memastikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tetap berlaku sampai tahun 2016 mendatang. Setelah itu program Jamkesda Kota Yogyakarta akan berintegrasi JKN BPJS. **(Tri)-m**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. UPT. Jamkesda	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005